

KAJIAN PERBANDINGAN KETERSEDIAAN FASILITAS PENDIDIKAN ANTAR-KECAMATAN SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN DI KABUPATEN KERINCI

Wellvy Firstia Diany¹, Fadjar Hari Mardiansjah¹

¹Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

Abstrak

Kesempatan untuk mengikuti pendidikan merupakan suatu hak dan kewajiban setiap warga negara berdasarkan amanat konstitusi negara, yang juga menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakannya. Oleh karena itu, pelayanan pendidikan merupakan suatu pelayanan dasar yang sangat penting di dalam proses pembangunan wilayah maupun nasional. Untuk mewujudkan tekad tersebut, pemerintah menuangkan urusan pendidikan ke dalam kebijakan desentralisasi, dimana pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menyediakan dan mengelola penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar dan menengah. Dengan menggunakan kasus pemekaran wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh pada tahun 2008, penelitian ini ditujukan untuk menganalisis dampak pemekaran terhadap pelayanan fasilitas pendidikan dasar dan menengah di daerah. Penelitian yang mempergunakan data sekunder dari data statistik daerah ini mengamati tingkat pelayanan fasilitas pendidikan, yang direpresentasikan oleh tingkat kecukupan sediaan fasilitas di setiap wilayah, dan melakukan perbandingannya antarwilayah untuk memahami dinamika tingkat pelayanan sebelum dan sesudah pemekaran. Analisis yang dilakukan mengacu kepada standar pelayanan nasional serta memanfaatkan perhitungan yang menggunakan model Koefisien Indeks Gini dilakukan untuk melihat perbandingan pemerataan penyediaan tingkat pelayanan fasilitas pendidikan antarkecamatan. Selain itu, perhitungan yang dilakukan secara antartahun dilakukan untuk memahami dinamika pemerataan sebelum dan sesudah pemekaran terjadi. Hasil penelitian memperlihatkan menurunnya tingkat pelayanan yang berasal dari ketersediaan pelayanan fasilitas pendidikan secara agregat di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, dimana terkonsentrasinya beberapa jenis layanan fasilitas pendidikan menengah Kabupaten Kerinci pada wilayah Kecamatan Sungai Penuh memberi pengaruh kepada perubahan tingkat pelayanan dan tingkat pemerataan layanan setelah dilakukan pemekaran Kota Sungai Penuh dari Kabupaten Kerinci.

Kata kunci: Kabupaten Kerinci; Kota Sungai Penuh; otonomi daerah; pelayanan pendidikan; pemekaran wilayah

Abstract

Educational opportunity is a right and obligation for every citizen based on the mandate of constitution, which also become government's obligation to provide. Therefore, education service is a very important basic service in the regional as well as national development process. To fulfil this determination, the government has incorporated education affairs to the decentralization policy, in which local governments are given the authority to provide and manage the delivery of basic and secondary education services. Using the case of the split of Kerinci Regency and the formation of Sungai Penuh City in 2008, this study aimed to analyze the impact of the split on primary and secondary education facilities in the regions. This study uses secondary data from regional statistical data, observes the level of service of educational facilities, which is represented by the level of adequacy of the availability of facilities in each region, and compares the regions to understand the dynamics of the level of service before and after the split. Analysis was carried out by referring to national service standards and utilizing calculations through the Gini Index Coefficient model to see the comparison of distribution of service provision of educational facilities between subdistricts. In addition, interyear calculations are carried out to understand the dynamics of equity before and after the split. The result shows a decrease in the level of service originating from the availability of educational facilities in whole Kerinci Regency and Sungai Penuh City, where the concentration of several types of Kerinci secondary education facility services in the Sungai Penuh subdistrict has an influence on changes of service levels and the level of distribution of services after the split of Sungai Penuh City from Kerinci Regency.

Keywords: educational facilities and services; Kerinci Regency; local autonomy; regional split; Sungai Penuh City

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu aspek pelayanan negara yang sangat penting dalam pembangunan nasional, seperti yang diamanatkan dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar dan menengah, setidaknya atas pembiayaan dari negara atau pemerintah (Pemerintah Republik Indonesia, 1945). Dengan demikian, pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab individu, melainkan juga menjadi tanggung jawab pemerintah yang didelegasikan kepada pemerintah daerah di masa otonomi daerah. IASA dalam Nyarkoh (2016) menyatakan bahwa penyediaan pendidikan yang baik tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan individu saja, tetapi juga menjadi salah satu syarat untuk terjadinya pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah dan nasional dalam jangka panjang. Hal ini sesuai dengan pendapat Schultz dalam Widiensyah (2017) yang menyatakan bahwa pembangunan sektor pendidikan, dengan manusia sebagai fokus intinya, telah memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi pada suatu negara.

Kebijakan otonomi daerah telah menjadi landasan dan prinsip utama dalam pelaksanaan desentralisasi di Indonesia (Winardi, 2017). Otonomi daerah berarti memberikan hak, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengelola beberapa urusan pemerintahan dan kepentingan publik dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang salah satunya adalah penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah. Faguet (2004) mengharapkan bahwa otonomi daerah membuat pemerintah lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal dengan menyesuaikan tingkat penyediaan dengan kebutuhan kelompok atau unit yang lebih kecil di daerah. Namun, indikasi yang terjadi di Indonesia masih terdapat kesenjangan antara ketersediaan fasilitas terhadap penduduk yang dilayani. Penyediaan pelayanan fasilitas pendidikan tidak hanya penting bagi para penduduk, tetapi juga sangat penting bagi masa depan wilayahnya. Prakoso (2018) mengatakan perkembangan suatu wilayah sangat terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana wilayah, khususnya sarana perekonomian, pendidikan, dan kesehatan.

Kabupaten Kerinci yang merupakan bagian dari Provinsi Jambi, mengalami pemekaran daerah menjadi dua wilayah administrasi yakni Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci pada tahun 2008 berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 (Pemerintah Republik Indonesia, 2008). Sungai Penuh, yang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Kerinci dan juga merupakan tempat berlokasinya kabupaten tersebut di masa lalu, berubah status administratif menjadi daerah kota. Pemekaran ini mempengaruhi sistem pusat pelayanan yang ada di kabupaten tersebut, mengingat Sungai Penuh juga menjadi pusat pelayanan untuk seluruh wilayah di Kabupaten Kerinci sebelum pemekaran. Di satu sisi, pemekaran mengharapkan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengoptimalan fungsi penyelenggaraan pendidikan melalui penyediaan dan pemerataan sarana dan prasarana yang lebih baik. Namun disisi lain, pemekaran juga mengurangi sediaan fasilitas pendidikan yang terdapat di kabupaten tersebut sebagai konsekuensi dari pemekaran yang menjadikan seluruh sarana sekolah yang berlokasi di wilayah Sungai Penuh menjadi milik dari Kota Sungai Penuh. Padahal, banyak diantara fasilitas pendidikan tersebut yang juga merupakan orientasi tujuan dari sejumlah murid terutama pada jenjang pendidikan menengah yang ada di wilayah lain di Kabupaten Kerinci.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika tingkat pelayanan pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Kerinci pada masa otonomi daerah, sebelum dan sesudah dilakukannya pemekaran daerah. Kabupaten Kerinci merupakan kabupaten yang mengalami pemekaran daerah yang mengakibatkan kawasan ibukota kabupatennya di masa lalu, yaitu Kecamatan Sungai Penuh, turut menjadi bagian yang dimekarkan sebagai bagian wilayah dari daerah lain pasca pemekaran. Pentingnya penelitian dinamika tingkat pelayanan fasilitas dalam konteks pemekaran daerah ini tidak saja akan mampu memperlihatkan bagaimana pengaruh terjadinya pemekaran daerah terhadap tingkat pelayanan pendidikan berdasarkan ketersediaan fasilitasnya, namun juga dapat memperlihatkan apakah kebijakan pemekaran daerah di dalam era otonomi daerah mampu meningkatkan pelayanan pendidikan berdasarkan ketersediaan dan penyediaan fasilitasnya.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 SISTEM PUSAT PELAYANAN

Sistem pusat pelayanan merupakan arahan yang mengatur pendistribusian sarana dan prasarana wilayah untuk membangun organisasi ruang melalui pengaturan dan pengelolaan sistem pusat-pusat pelayanan dan kegiatan ekonomi,

sosial, dan budaya. Ketersediaan fasilitas atau sarana dan prasarana di suatu wilayah memiliki proporsi yang berbeda-beda, tergantung kepada kekuatan sistem pendukung keberadaan sarana dan/atau prasarana tersebut. Utari (2015) menjelaskan bahwa wilayah dengan tingkat ketersediaan fasilitas yang lebih baik akan menjadi pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan bagi wilayah lain yang memiliki tingkat ketersediaan fasilitas yang kurang baik. Perbedaan dan variasi seperti inilah yang memunculkan adanya hirarki pusat pelayanan dalam suatu wilayah. Rondinelli dalam Rusmansyah (2006) menjelaskan bahwa hirarki atau tingkatan kota akan mempengaruhi fungsi dari kota itu sendiri, dimana kota-kota itu sendiri memiliki tugas dan fungsinya masing-masing dalam memberikan pelayanan. Terdapat delapan fungsi dari kota menengah dan kecil, antara lain sebagai pusat pelayanan umum dan sosial, pusat komersial dan pelayanan jasa, pusat pemasaran dan perdagangan regional, pusat penyediaan dan pemrosesan produk-produk pertanian, pusat industri kecil, pusat transportasi dan komunikasi regional, pusat penarik migrasi dari pedesaan dan menjadi sumber pendapatan bagi daerah pedesaan, serta sebagai pusat transformasi sosial (Rondinelli, 1983). Berbicara mengenai pusat pelayanan, Christaller (1933) mendefinisikan teori tempat sentral (*central place theory*) sebagai satu kesatuan unit dasar permukiman dengan dilengkapi pusat-pusat pelayanan di dalamnya, dimana jumlah penduduk menjadi salah satu penentu dalam tingkat pelayanan pusat sentral yang membentuk satu fungsi. Menurut Sutriadi dalam Citraningtyas (2009), terdapat dua faktor yang mempengaruhi jumlah, luas dan sebaran, serta hirarki dari pusat-pusat pelayanan di suatu wilayah, yaitu ambang batas minimum jumlah penduduk dan jangkauan wilayah pelayanan. Tiap pusat memiliki kebutuhan batas ambang penduduk yang dilayaninya, yaitu jumlah minimum penduduk yang dibutuhkan untuk dilayani dari suatu pusat pelayanan masyarakat guna mendukung kelancaran sediaan pelayanan atas barang dan jasa yang dibutuhkan tersebut. Tiap pusat pelayanan membutuhkan penduduk pendukung minimum sesuai dengan jenis fasilitas-fasilitas pelayanan yang merupakan elemen dari pusat pelayanannya. Tiap pusat pelayanan juga memiliki jangkauan pasar tertentu, yaitu suatu jarak pelayanan dimana seseorang dapat dan bersedia untuk mencapai fasilitas-fasilitas pelayanan yang ada di pusat pelayanan. Adapun satuan jarak yang dimaksud bisa berupa jarak fisik, waktu tempuh maupun ongkos, atau kombinasi dari ketiganya.

2.2 KEADILAN RUANG (SPATIAL JUSTICE)

Keadilan ruang merupakan kerangka kerja analitis yang membuat ruang dipahami sebagai produksi fisik, sosial dan mental, dimana pemahaman didalamnya melibatkan pemahaman bagaimana hubungan spasial menghasilkan hubungan sosial (Williams, 2013). Pengertian lain juga dikemukakan oleh Rocco (2014) bahwa keadilan ruang mengacu pada bagaimana masyarakat dapat mengakses barang publik, layanan dasar, peluang ekonomi dan lingkungan yang sehat melalui perencanaan tata ruang yang adil, inklusif dan efisien, dimana desain dan pengelolaan ruang serta ketersediaan sumber daya perkotaan dan pedesaan yang berbeda menuntut adanya intervensi di dalamnya.

Dalam mewujudkan ruang yang adil dan merata tentu saja memerlukan adanya dukungan dari berbagai pihak, dukungan berupa kebijakan hukum ataupun pembangunan fisik secara langsung. Dalam sebuah penelitian menyebutkan bahwa terpenuhinya karakteristik serta kriteria sosial merupakan keberhasilan pembangunan berdasarkan konsep keadilan ruang (Setiawan & Syahbana, 2017). Jika konsep keadilan ruang dilihat dari perspektif Undang-Undang penataan ruang yang berlaku di Indonesia maka Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjadi salah satu sumber sebagai dasar dalam penataan ruang dengan berasaskan keadilan, dimana segala bentuk perencanaan struktur ruang dan pola ruang yang ada di suatu wilayah sangat didasarkan kepada prinsip adil dan merata. Hal ini dimaksudkan agar semua wilayah mampu berkembang dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya secara adil dan merata.

2.3 KEBUTUHAN FASILITAS PELAYANAN SOSIAL

Kebutuhan merupakan aspek yang harus dipenuhi oleh manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari guna mencapai kehidupan yang nyaman dan sejahtera, dimana salah satu aspek yang termasuk ke dalam kebutuhan tersebut adalah kebutuhan fasilitas sosial. Menurut Lupiodadi dalam Sofyan (2013) fasilitas merupakan penampilan, kemampuan sarana prasarana dan keadaan lingkungan sekitarnya dalam menunjukkan eksistensinya kepada eksternal yang meliputi fasilitas fisik (gedung), perlengkapan, dan peralatan. Penyediaan fasilitas membutuhkan adanya peran dari lembaga/instansi yang memiliki andil dan kewenangannya di dalam pembangunan, yang dapat berupa perseorangan, kelompok, pemerintah, dan swasta. Pemerataan ketersediaan fasilitas pelayanan memiliki kaitan yang erat dengan prinsip keadilan ruang. Prinsip ini lebih memperhatikan bagaimana manfaat dari fasilitas atau sumber daya terdistribusi secara adil berdasarkan distribusi kebutuhan atau penduduknya (Soja, 2016). Pemerataan dapat diwujudkan melalui standarisasi pelayanan minimum dengan

memperhatikan bahwa setiap individu dapat mengakses berbagai layanan tersebut Hay dalam Dadashpoor, Rostami, & Alizadeh (2016). Pemerataan pelayanan fasilitas sosial berdasarkan distribusi penduduknya ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mengakses pelayanan fasilitas yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta menunjang aktivitasnya sehari-hari.

Pemerintah sebagai salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan fasilitas sosial untuk masyarakat, bertanggung jawab untuk menjamin bahwa masyarakat dapat mengakses dan memperoleh layanan fasilitas secara baik dan merata. Menurut Sujarto dalam Citraningtiyas & Kustiwan (2009) fasilitas sosial sebagai aktivitas atau material yang dapat melayani kebutuhan masyarakat akan kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan sosial, mental, dan spiritual, diantaranya terdapat fasilitas pendidikan, peribadatan, kesehatan dan kemasyarakatan, rekreasi, olahraga serta perkuburan. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Yeates dalam Sukmawati & Yuliastuti (2014) bahwa fasilitas sosial sebagai aktivitas dan materi yang melayani kebutuhan masyarakat dalam memberikan kepuasan sosial, mental dan spiritual. Menurut Vincent; Committee Rooms; dan Delwp Victoria dalam Setiawan & Syahbana (2017) fasilitas sosial merupakan bagian dari infrastruktur masyarakat dan infrastruktur publik, dengan tujuan untuk melancarkan kegiatan serta dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup.

Utoro (2006) dalam penentuan dan pendistribusian fasilitas harus di pertimbangkan berbagai faktor yang mungkin mempengaruhi. Menurut Suyarto (1977) terdapat dua faktor yang perlu diperhatikan dalam penentuan dan pendistribusian fasilitas sosial, antara lain sebagai berikut:

- a. Faktor manusia yang akan mempergunakan pusat-pusat pelayanan. Faktor ini menyangkut mengenai pertimbangan-pertimbangan mengenai jumlah penduduk yang akan mempergunakan pelayanan tersebut, kepadatan penduduk, perkembangan penduduk, status sosial ekonomi masyarakat, nilai-nilai, potensi masyarakat, pola kebudayaan dan antropologi.
- b. Faktor lingkungan manusia melaksanakan kegiatan hidupnya. Lingkungan ini menyangkut mengenai skala lingkungan dalam arti fungsi dan peranan sosial ekonominya, jaringan pergerakan, letak geografi lingkungan, dan sifat keterpusatan lingkungan.

2.4 PENGUKURAN TINGKAT PELAYANAN PENYEDIAAN FASILITAS PENDIDIKAN

Prinsip keadilan menjadi salah satu aspek utama dalam proses perkembangan wilayah. Hal ini merupakan prinsip dasar yang harus dipertimbangkan dalam mengurangi kesenjangan yang terjadi akibat dari adanya proses pembangunan. Penerapan konsep keadilan dan kesetaraan memerlukan adanya sikap melepas faktor untung-rugi dengan memperhatikan kebutuhan setiap wilayah dan kelompok sosial masyarakatnya, dimana setiap kelompok sosial memiliki kebutuhan yang bisa berbeda-beda Decimal & Sen dalam Setiawan & Syahbana (2017). Kesenjangan merupakan suatu hal yang bisa dipahami, dimana hal tersebut terjadi akibat dari adanya proses pembangunan (Wilsonoyudho, 2009). Saat ini pemerintah sudah berupaya mewujudkan pembangunan yang lebih berimbang, termasuk di dalam penyediaan pelayanan pendidikan, melalui kebijakan desentralisasi pemerintahan serta dibarengi kerja sama langsung pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi permasalahan pembangunan di masing-masing wilayah.

Kesenjangan wilayah merupakan suatu kondisi yang menyebabkan adanya perbedaan tingkat kesejahteraan dan perkembangan ekonomi antarwilayah, yang juga diakibatkan oleh adanya perbedaan tingkat pelayanan. Permasalahan kesenjangan yang terjadi saat ini masih didominasi oleh adanya perbedaan pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, serta rendahnya akses masyarakat terhadap sarana prasarana sosial ekonomi (Ratnasari & Santoso, 2014). Kesenjangan antarwilayah yang terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya perbedaan latar belakang demografis, geografis, ketersediaan infrastruktur dan budaya yang tidak sama, serta kapasitas dan ketersediaan sumber daya yang berbeda.

2.4.1 Standar Kecukupan Sarana Pendidikan

Dalam pemenuhan kebutuhan dan pemerataan fasilitas pendidikan pemerintah sudah memiliki standar minimal pelayanan yang harus dipenuhi dalam penyediaan sarana pendidikan, yang mana hal ini diatur dalam SNI 03-1733-2004 tentang tata

cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan, yang mana dalam aturan tersebut memuat beberapa hal yang berkaitan dengan pendidikan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kecukupan Sarana Pendidikan Dasar dan Menengah

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)	Peserta Didik (Murid)	Koefisien layanan
1	Sekolah Dasar (SD)	1.600	240	6,67
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	4.800	240	13,3
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	4.800	240	13,3

Sumber: Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia, 2004

Dari ketentuan standar pelayanan tersebut, maka dapat dihitung tingkat kecukupan pelayanan sarana/fasilitas sekolah menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kecukupan sarana sekolah} = \text{Koefisien Layanan} \times \left(\frac{\text{Jumlah Peserta Didik}}{\text{Jumlah Penduduk Pendukung}} \right)$$

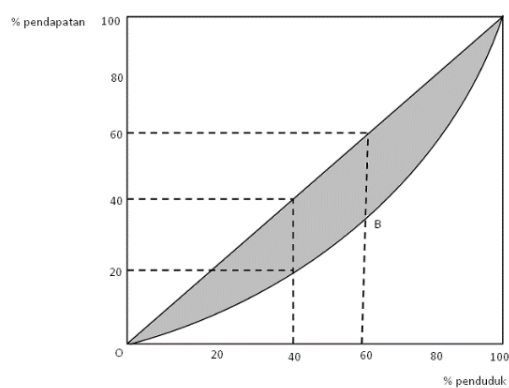
Beberapa ketentuan menurut Standar Nasional Indonesia (2004) tersebut adalah:

- a. Sekolah Dasar (SD)
Penyediaan fasilitas untuk sekolah dasar ini untuk melayani 1.600 jiwa penduduk dengan luas lahan minimal 2.000 m², dengan radius pencapaian maksimal sejauh 1.000 m², dimana di dalam satu sekolah tersebut menampung sebanyak 240 siswa, setiap 1 kursi yang disediakan melayani sekitar 6,67 murid.
- b. Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Penduduk minimal yang dilayani oleh fasilitas pendidikan SMP ini adalah sebesar 4.800 jiwa dengan radius pencapaian minimal 1.500 m² dengan daya tampung sebanyak 240 siswa. Untuk 1 kursi yang disediakan menampung 13,3 murid di tingkat SMP, dimana ketersediaan 1 kursi untuk melayani murid ini dikenal dengan sistem koefisien layanan.
- c. Sekolah Menengah Atas (SMA)
Penduduk minimal yang dilayani oleh fasilitas pendidikan SMA ini sebanyak 4.800 jiwa, dibangun diatas lahan dengan luas minimal 12.500 m², dimana radius pencapaiannya adalah 3.000 m², dengan daya tampung siswa sebanyak 240 murid, untuk setiap 1 kursi disediakan untuk 13,3 orang murid.

Meskipun standar pelayanan minimal untuk fasilitas pendidikan sudah ditetapkan, masih terdapat kesenjangan di beberapa wilayah di Indonesia. Winardi (2017) menyebutkan desentralisasi pendidikan masih merupakan kesenjangan regional dalam pengembangan pendidikan di Indonesia. Hal ini dilihat dari kurangnya fasilitas sekolah di beberapa daerah di Indonesia, sehingga hal ini mempengaruhi rasio jumlah sekolah dengan jumlah siswa dan rasio jumlah sekolah dengan jumlah guru di beberapa wilayah. Sehingga dengan demikian diperlukan adanya suatu kajian lebih lanjut mengenai seberapa jauh kesenjangan yang terjadi dalam pelayanan fasilitas pendidikan.

2.4.2 Pemerataan Pelayanan Fasilitas Pendidikan

Dalam penyediaan pelayanan fasilitas pendidikan, diperlukan adanya distribusi yang merata untuk menghindari terjadinya kesenjangan. Kesenjangan wilayah yang terjadi ini dapat berimplikasi terhadap terganggunya stabilitas dan pertumbuhan perekonomian, yang mana hal ini menyebabkan kurang optimalnya penggunaan sumber daya manusia, ketidakstabilan politik dan ekonomi, serta meningkatkan risiko terjadinya krisis (Vo, et. al., 2019). Dengan adanya hal tersebut memerlukan adanya pembangunan dengan pendekatan yang berbeda di setiap wilayah untuk menghindari kesenjangan yang terjadi. Dalam hal mengetahui besarnya kesenjangan wilayah yang terjadi dapat dilihat dari kesenjangan pendapatan per kapita, kualitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, dan akses ke perbankan (Kurniati, Suharso, & Surjono, 2010). Untuk mengetahui ukuran dari ketimpangan yang terjadi dapat dilihat dari kurva Lorenz (lihat Gambar 1) dan Koefisien Indeks Gini, yang mana kurva Lorenz ini dapat memberikan informasi mengenai tingkat kesenjangan yang dilihat dari diagonal utama pada bujur sangkar, hal ini ditunjukkan dengan semakin lurus garis diagonal yang dibentuk maka menyatakan semakin kecil tingkat kesenjangan yang terjadi dan begitupun sebaliknya.



Gambar 1. Kurva Lorentz

Sedangkan Indeks Gini digunakan untuk melihat tingkat pemerataan suatu variabel yang ingin dilihat kesenjangan. Menurut Bustomi (2012) Indeks Gini pendidikan dapat digunakan untuk mengetahui tingkat ketimpangan (ketidakmerataan) agregat pendidikan. Hal ini ditunjukkan dengan hasil perhitungan yang diperoleh, yang mana jika hasil perhitungan yang diperoleh 0 maka semakin kecil tingkat kesenjangan atau dengan kata lain distribusi pendidikan sudah semakin merata, jika semakin mendekati 1 menyatakan distribusi pendidikan yang semakin buruk.

$$\text{Gini} = \frac{\sum_{i > j} |Y_i - Y_j|}{2 \sum_{i=1}^n Y_i}$$

Keterangan:

N = Jumlah observasi

Y_i dan Y_j = Nilai pendapatan per kapita, namun untuk Gini pendidikan Y_i dan Y_j adalah tahun pencapaian sekolah.

Dari hasil perhitungan koefisien Indeks Gini maka disesuaikan dengan kriteria sebagai berikut:

GR < 0.3 artinya distribusi merata dengan baik

0.3 ≤ GR ≤ 0.5 artinya distribusi sedang

GR > 0.5 distribusi buruk

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Kabupaten Kerinci, yang mengalami pemekaran daerah yang melahirkan Kota Sungai Penuh di tahun 2008, dengan mengambil lima buah kecamatan termasuk Kecamatan Sungai Penuh yang dahulu berfungsi sebagai ibu kota kabupaten dan sekaligus juga sebagai pusat pelayanan di kabupaten tersebut. Kabupaten ini memiliki 11 kecamatan di tahun 2005 yang kemudian dimekarkan menjadi 17 kecamatan sebelum mekar di tahun 2008, sehingga tinggal memiliki 12 buah kecamatan pasca pemekaran di tahun 2008. Kemudian jumlah kecamatannya meningkat menjadi 16 kecamatan di tahun 2013 hingga saat ini. Sementara itu, kelima kecamatan di Kota Sungai Penuh berkembang menjadi delapan kecamatan sejak tahun 2013. Penelitian ini menstrukturkan wilayah Kabupaten Kerinci ke dalam empat buah bagian wilayah, yaitu Kawasan Utara-Siulak, Kawasan Tengah-Air Hangat, dan Kawasan Selatan-Danau Kerinci, serta Kawasan Sungai Penuh yang nantinya dimekarkan menjadi Kota Sungai Penuh. Dengan penstrukturkan ini, maka perhitungan tingkat kecukupan fasilitas pendidikan dilakukan pada tiga level kawasan, yaitu kecamatan, bagian wilayah kabupaten, dan level kabupaten. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan analisis tingkat pelayanan fasilitas per kecamatan dan/atau sub-wilayah tadi yang perhitungannya memanfaatkan data statistik kewilayahan tentang jumlah penduduk, jumlah sekolah beserta jumlah muridnya di setiap jenjang pendidikan dasar dan menengah (SD, SMP dan SMA). Data statistik tersebut dianalisis dengan menggunakan unit analisis kecamatan, yang diolah dengan menggunakan metode perhitungan yang berbasis kepada standar pelayanan penduduk yang diatur dalam SNI 03-1733-2004 tentang tata cara perencanaan kawasan perumahan dan permukiman perkotaan. Untuk mendapatkan gambaran dinamika pengaruh pemekaran daerah tersebut, maka analisis dilakukan dalam beberapa waktu tertentu, sebelum dan setelah pemekaran, yaitu tahun 2005, 2010 dan 2015.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 TINGKAT KECUKUPAN LAYANAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN KERINCI DAN KOTA SUNGAI PENUH

Tabel 2 memperlihatkan bahwa tingkat pelayanan pendidikan Sekolah Dasar merupakan jenjang pendidikan dengan tingkat pelayanan yang tertinggi bila dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya. Secara agregat tingkat pelayanan SD berdasarkan kecukupan fasilitasnya di Kabupaten Kerinci pada tahun 2005 mencapai 97%. Pemekaran daerah pada tahun 2008 telah mempengaruhi perubahan tingkat kecukupan pelayanan pendidikan menjadi 90% pada tahun 2010, yang kemudian menurun menjadi 85% pada tahun 2015. Tabel 2 memperlihatkan perkembangan tingkat kecukupan pelayanan fasilitas pendidikan di Kabupaten Kerinci, untuk ketiga jenis/jenjang pendidikan dasar dan menengah, baik secara parsial untuk tiap kecamatan, bagian wilayah, maupun secara agregat seluruh kabupaten dan Kota Sungai Penuh, pada tahun 2005, 2010 dan 2015. Tingkat pelayanan agregat Kabupaten Kerinci untuk SD tersebut tidak jauh berbeda apabila dibandingkan dengan tingkat pelayanannya di masing-masing bagian wilayah atau kawasan. Perbedaan yang signifikan baru tampak terlihat pada tingkat pelayanan di level kecamatan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penurunan tingkat kecukupan layanan diakibatkan oleh terjadinya penambahan penduduk di setiap kawasan, termasuk di kecamatan-kecamatan di dalamnya.

Pada Tabel 2 tersebut, tampak bahwa pemekaran daerah memberi dampak kepada menurunnya tingkat kecukupan layanan fasilitas Pendidikan SD. Penurunan tidak hanya terjadi secara agregat, tetapi juga pada setiap Kawasan dan termasuk juga kecamatan di dalamnya. Penurunan tingkat kecukupan layanan tidak hanya terjadi di wilayah Kabupaten Kerinci melainkan juga terjadi di wilayah Kota Sungai Penuh yang baru lahir di tahun 2008. Terdapat kecenderungan beberapa kecamatan lama (kecamatan induk), seperti Kecamatan Kayu Aro, Air Hangat, dan Gunung Raya di Kabupaten Kerinci, dan juga Kecamatan Sungai Penuh di Kota Sungai Penuh, yang mengalami penurunan dari tahun 2005 ke tahun 2010 namun Kembali meningkat di tahun 2015. Besar kemungkinan kecenderungan tersebut diakibatkan karena kecamatan-kecamatan tersebut merupakan kecamatan-kecamatan pusat pelayanan utama di kawasannya masing-masing, sehingga berkurangnya tingkat kecukupan pelayanan di kecamatan-kecamatan pusat tadi segera mendapat respons penambahan fasilitas pendidikan, baik yang disediakan oleh fasilitas sekolah negeri maupun oleh fasilitas pendidikan swasta.

Kondisi yang berbeda tampak pada jenjang pendidikan SMP. Secara agregat tingkat kecukupan layanan pendidikan SMP di Kabupaten Kerinci berada di bawah 60% pada tahun 2005-2015. Pada Tabel 2 diperlihatkan bahwa pada tahun 2010 untuk beberapa kecamatan induk setelah adanya pemekaran mengalami peningkatan kecukupan layanan seperti di Kecamatan Kayu Aro. Namun, untuk beberapa kecamatan lainnya mengalami penurunan pelayanan setelah adanya pemekaran (Kecamatan Gunung Kerinci, Kecamatan Air Hangat, Kecamatan Merangin dan Kecamatan Keliling Danau). Kota Sungai Penuh pasca dimekarkan mengalami perubahan yang cenderung meningkat dari tahun 2005. Perubahan yang terjadi di Kecamatan Sungai Penuh pada tahun 2015 cukup signifikan jika dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya, terjadi peningkatan di atas 100% dari tahun sebelumnya. Tingginya peningkatan yang terjadi di Kecamatan Sungai Penuh ini dipengaruhi oleh mekarnya dua wilayah kecamatan baru yaitu Kecamatan Pondok Tinggi dan Sungai Bungkal sebagai wilayah pemekaran Kecamatan Sungai Penuh, pemekaran tersebut membagi jumlah penduduk untuk masing-masing kecamatan di dalamnya.

Pembagian jumlah penduduk ini berpengaruh terhadap perubahan daya tampung sekolah setelah adanya pemekaran. Hal ini sejalan yang dikemukakan oleh Sujarto dalam Utoro (2006) bahwa faktor yang mempengaruhi pendistribusian fasilitas sosial adalah manusia dengan mempertimbangkan mengenai jumlah penduduk yang akan mempergunakan pelayanan tersebut, kepadatan penduduk, perkembangan penduduk, status sosial ekonomi masyarakat, nilai-nilai, potensi masyarakat, pola kebudayaan dan antropologi.

Berdasarkan kewenangan pengelolaan pendidikan, jenjang pendidikan SMP berada dalam kewenangan pemerintah Kabupaten Kerinci, sejatinya dengan adanya pemekaran pelayanan pendidikan bisa diperbaiki dengan pemerataan jumlah murid dengan memperhitungkan sebaran jumlah penduduk untuk masing-masing wilayah. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kualitas ideal pelayanan. Dengan demikian, pemerataan dapat diwujudkan melalui standarisasi pelayanan minimum dengan memperhatikan bahwa setiap individu dapat mengakses berbagai layanan tersebut Hay dalam Dadashpoor, Rostami, & Alizadeh (2016).

Pada jenjang pendidikan SMA, jika dilihat secara agregat untuk kecukupan layanannya di bawah 50% pada tahun 2005-2015. Kondisi ini sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan pelayanan pada jenjang pendidikan SD dan SMP. Pada Tabel 2 diperlihatkan bahwa tingkat kecukupan layanan yang terdapat di Kabupaten Kerinci masih sangat rendah, terlihat di beberapa kecamatan dengan pelayanan di bawah 20% seperti di Kecamatan Kayu Aro (kecamatan induk) pada tahun 2005, dan Kecamatan Gunung Tujuh serta Depati VII yang merupakan kecamatan pemekaran pada tahun 2015.

Tabel 2. Tingkat Kecukupan Layanan Pendidikan Kabupaten Kerinci Tahun 2005-2015

No	Nama Kecamatan	Tingkat Kecukupan Layanan SD (%)			Tingkat Kecukupan Layanan SMP (%)			Tingkat Kecukupan Layanan SMA (%)		
		Tahun 2005	Tahun 2010	Tahun 2015	Tahun 2005	Tahun 2010	Tahun 2015	Tahun 2005	Tahun 2010	Tahun 2015
1	Kayu Aro	91	88	129	63	68	44	17	40	59
2	Gunung Tujuh	-	87	89	-	46	35	-	6	11
3	Kayu Aro Barat	-	-	62	-	-	69	-	-	28
4	Gunung Kerinci	93	88	76	58	53	53	20	23	23
5	Siulak	-	83	96	-	58	40	-	39	47
6	Siulak Mukai	-	-	55	-	-	62	-	-	23
Kawasan Utara Siulak		92	92	86	61	60	50	18	33	35
7	Air Hangat	98	76	116	70	69	68	33	70	0
8	Air Hangat Barat	-	-	68	-	-	34	-	-	131
9	Air Hangat Timur	96	91	70	59	54	44	36	35	22
10	Depati VII	-	84	70	-	47	33	-	0	10
11	Sitinjau Laut	115	106	68	72	40	31	55	108	50
Kawasan Air Hangat		103	103	88	68	54	42	40	53	35
12	Danau Kerinci	130	108	77	74	57	44	40	58	61
13	Keliling Danau	89	94	70	59	54	48	39	38	41
14	Gunung Raya	114	103	143	-	-	30	-	-	27
15	Bukit Kerman	-	-	68	56	59	53	22	44	31
16	Batang Merangin	67	91	122	34	48	64	23	32	43
Kawasan Selatan Danau Kerinci		96	96	98	27	59	47	31	42	42
Kabupaten Kerinci		97	97	90	38	56	47	29	41	37
17	Sungai Penuh	97	86	107	88	119	332	129	99	330
18	Pondok Tinggi	-	-	58	-	-	36	-	-	62
19	Sungai Bungkal	-	-	61	-	-	78	-	-	9
20	Tanah Kampung	-	41	72	-	53	64	-	48	40
18	Kumun Debai	-	39	71	-	47	42	-	81	96
22	Hamparan Rawang	98	92	71	59	70	81	35	13	9
23	Pesisir Bukit	-	102	83	-	49	62	-	209	257
24	Koto Baru	-	-	75	-	-	21	-	-	107
Kawasan Kota Sungai Penuh		97	97	81	78	82	87	96	102	101

Adanya perbedaan yang cukup signifikan antara kecukupan layanan pendidikan SMA dengan pendidikan SD dan SMP, membuktikan bahwa terdapat kemungkinan bahwa penduduk dengan umur SMA sudah memiliki kemampuan yang berbeda dalam hal memilih lokasi sekolah. Kondisi tersebut memungkinkan untuk penduduk yang ada di suatu wilayah bersekolah di

wilayah yang lain. Hal ini dapat mempengaruhi ketidakmerataan jumlah murid di setiap wilayah, sehingga menimbulkan minimnya kecukupan layanan di beberapa wilayah tertentu.

Selain dari rendahnya tingkat kecukupan pelayanan, di Kecamatan Air Hangat pada tahun 2015 belum memiliki layanan pendidikan SMA. Hal ini disebabkan oleh pemekaran wilayah Air Hangat dengan Air Hangat Barat, sehingga secara administrasi sekolah yang dulunya menjadi bagian dari Kecamatan Air Hangat berpindah pengelolaan kepada kecamatan pemekarannya. Dilihat dari Kota Sungai Penuh masih terdapat beberapa kecamatan yang memiliki tingkat kecukupan pelayanan di bawah 20%, namun untuk Kecamatan Sungai Penuh memiliki tingkat kecukupan pelayanan di atas 300%, karena sebagian besar sarana pendidikan memusat di kecamatan tersebut. Kedudukan Kecamatan Sungai Penuh sebagai wilayah dengan pelayanan tertinggi menguntungkan beberapa wilayah di sekitarnya, dimana menurut Utari (2015) dikatakan bahwa wilayah dengan tingkat fasilitas yang baik akan menjadi pusat pertumbuhan bagi wilayah yang memiliki tingkat fasilitas yang kurang baik, terutama bagi wilayah Kabupaten Kerinci yang lokasinya berdekatan dengan wilayah Kota Sungai Penuh pada umumnya.

4.2 TINGKAT PEMERATAAN PENYEDIAAN PELAYANAN FASILITAS PENDIDIKAN DI KABUPATEN KERINCI

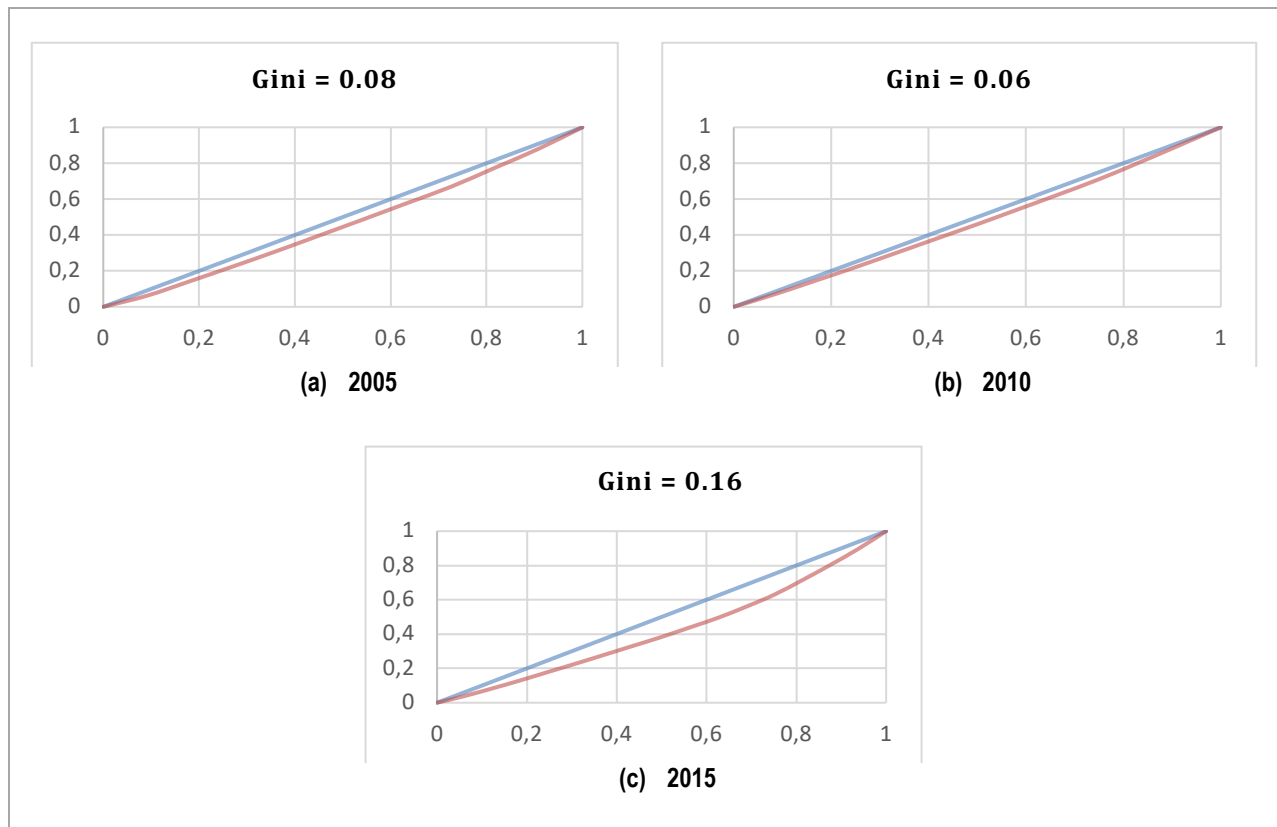
4.2.1 Tingkat Pemerataan Penyediaan Fasilitas Sekolah Dasar

Perkembangan distribusi pelayanan fasilitas pendidikan SD di Kabupaten Kerinci mengalami perubahan sebelum pemekaran dan setelah pemekaran (lihat Gambar 2). Pada tahun 2005 rasio Gini pelayanan pendidikan SD berada di angka 0.08, kemudian mengalami perubahan menjadi 0.06 pada tahun 2010 dan 0.16 pada tahun 2015. Menurunnya tingkat pemerataan pelayanan pendidikan dipengaruhi oleh pemekaran wilayah pada tahun 2008. Dalam kurun waktu 2005-2015 terdapat penambahan sebanyak 5 (lima) kecamatan baru yang mempengaruhi kondisi pemerataan pelayanan secara agregat. Beberapa kecamatan yang baru dimekarkan memiliki pelayanan yang sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan kecamatan induknya. Untuk tahun 2010 pelayanan terendah berada di Kecamatan Air Hangat sebesar 76%, dan tertinggi di Kecamatan Danau Kerinci sebesar 108%, dari kedua wilayah tersebut diketahui bahwa terdapat selisih pelayanan sebesar 32%, sedangkan di tahun 2015 Kecamatan Siulak Mukai yang memiliki tingkat kecukupan pelayanan sebesar 55%, sedangkan Kecamatan Gunung Raya sebesar 143%. Dari kedua wilayah tersebut terdapat selisih pelayanan sebesar 87%. Perbedaan inilah yang kemudian menjadi faktor dalam menurunnya pemerataan pelayanan di tahun 2015.

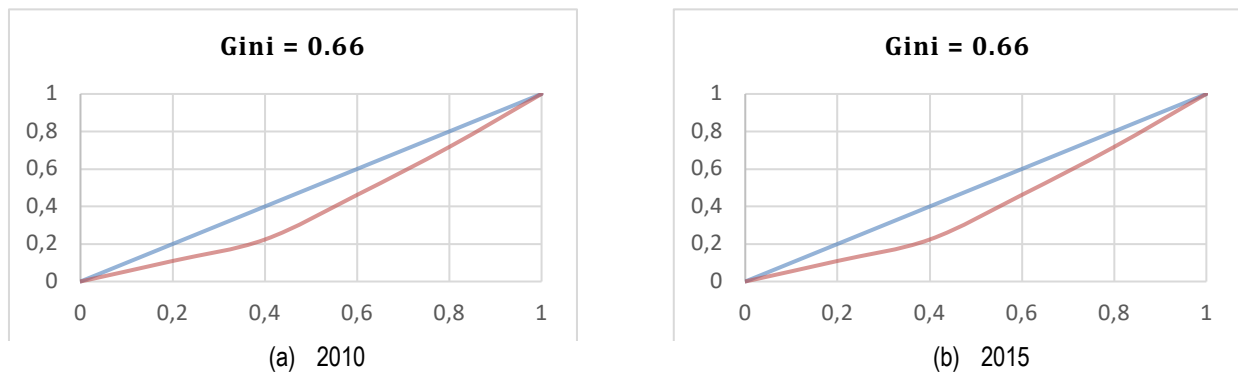
Jika pemerataan pelayanan yang terjadi di Kabupaten Kerinci pasca pemekaran mengalami penurunan, hal sebaliknya dialami oleh Kota Sungai Penuh. Pada Gambar 3 diketahui bahwa untuk tahun 2010 tingkat pemerataan pelayanan di Kota Sungai Penuh memiliki Indeks Gini sebesar 0.66 dengan kategori pemerataan buruk. Hal ini sejalan dengan tingkat kecukupan pelayanan pada tahun tersebut yang memiliki selisih pelayanan sebesar 63% dengan pelayanan tertinggi berada di Kecamatan Pesisir Bukit sebesar 102%, dan terendah di Kecamatan Kumun Debai sebesar 39%.

Sedangkan untuk tahun 2015 mengalami perbaikan pemerataan pelayanan menjadi 0.40 dengan kategori pemerataan sedang. Perbaikan pemerataan pelayanan yang terjadi di tahun 2015 ini dipengaruhi oleh meningkatnya tingkat kecukupan pelayanan di tahun tersebut. Jika awalnya pelayanan terendah berada di angka 39%, pada tahun 2015 meningkat menjadi 61%, dan tertinggi sebesar 107%. Sehingga, untuk selisih keduanya hanya berkisar di angka 46%, angka ini lebih kecil jika dibandingkan dengan selisih pelayanan pada tahun 2010.

Perbedaan pemerataan yang terjadi antara Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh ini terjadi karena adanya perbedaan tingkat kecukupan layanan, hal ini juga tidak lepas dari adanya pengaruh sejarah pemekaran pada tahun 2008 yang telah mempengaruhi perubahan layanan. Merujuk kepada yang terjadi di Kota Sungai Penuh, sejalan dengan yang dikemukakan oleh (Adrianto, Syamsurizaldi, & Zetra, 2018) bahwa kesenjangan yang terjadi di antarwilayah ini bisa disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang demografis, geografis, ketersediaan infrastruktur dan budaya yang tidak sama, serta kapasitas sumber daya yang berbeda.



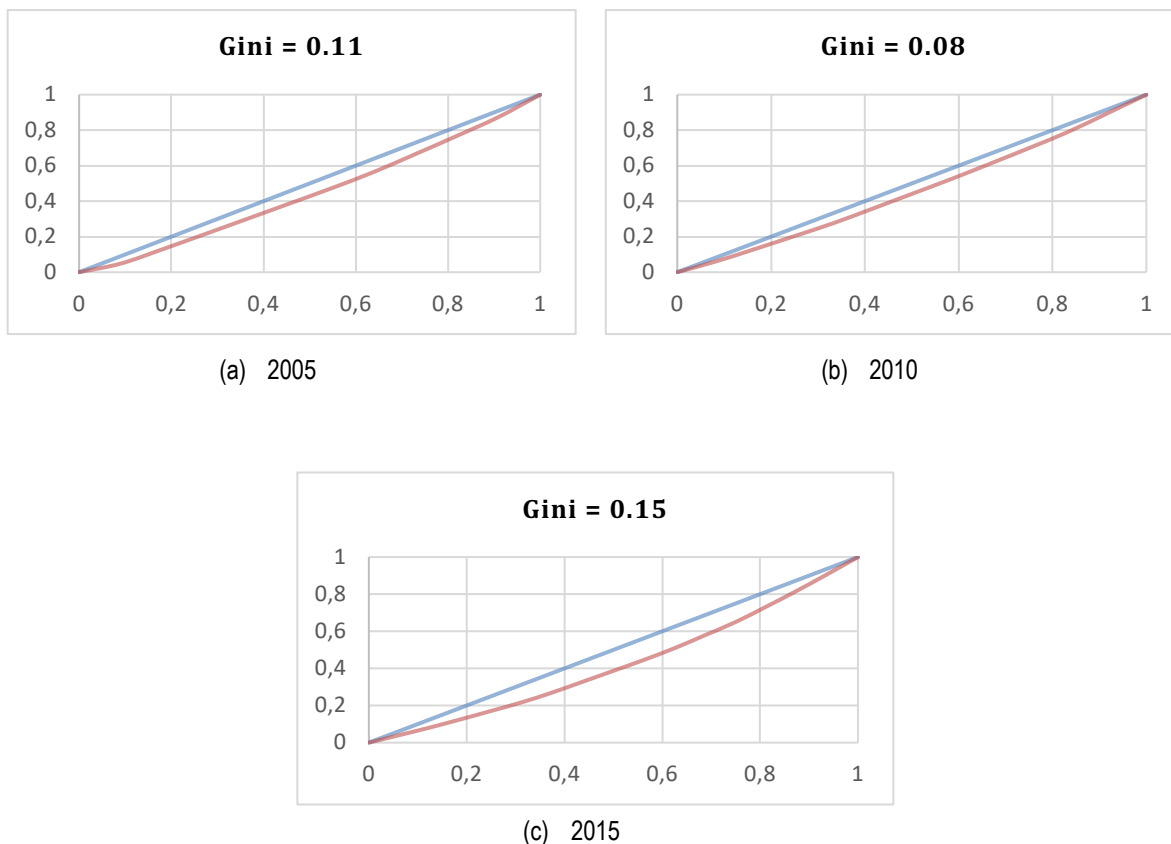
Gambar 2. Distribusi Pelayanan Fasilitas Pendidikan SD Kabupaten Kerinci tahun 2005-2015



Gambar 3. Distribusi Pelayanan Fasilitas Pendidikan SD Kota Sungai Penuh Tahun 2010-2015

4.2.2 Tingkat Pemerataan Penyediaan Fasilitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

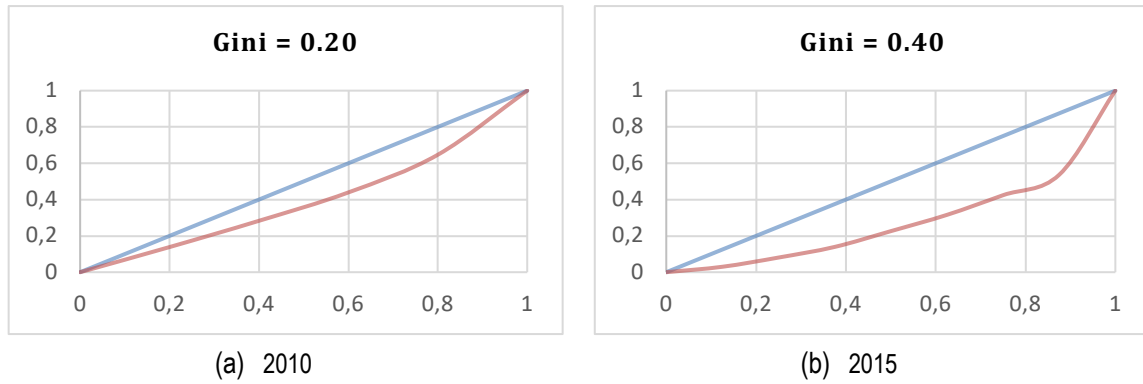
Pendistribusian pelayanan sarana pendidikan SMP dilihat dari angka Indeks Gini menunjukkan pendistribusian pelayanan yang cukup baik. Pada Gambar 4 untuk kondisi sebelum pemekaran angka Indeks Gini untuk pelayanan fasilitas sekolah SMP berada di angka 0.11, kemudian mengalami perbaikan pada tahun 2010 menjadi 0.08, dan 0.15 pada tahun 2015. Perubahan nilai Indeks Gini untuk masing-masing tahun di Kabupaten Kerinci tentu saja dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terkait dengan perkembangan wilayah dan perubahan kecukupan layanan di masing-masing kecamatan untuk tahun tersebut.



Gambar 4. Distribusi Pelayanan Fasilitas Pendidikan SMP Kabupaten Kerinci Tahun 2005-2015

Perubahan yang terjadi dalam kurun waktu lima belas tahun menunjukkan bahwa pemerataan pelayanan pendidikan di Kabupaten Kerinci sudah baik. Perubahan nilai Indeks Gini ini dipengaruhi oleh perubahan tingkat kecukupan pelayanan di tahun tersebut. Seperti yang terjadi di tahun 2010 setelah pemekaran, wilayah dengan tingkat kecukupan tertinggi berada di Kecamatan Air Hangat sebesar 69%, dan terendah di Kecamatan Sitinjau Laut sebesar 40%, sedangkan pada tahun 2015 untuk pelayanan tertinggi berada di angka 69%, dan terendah sebesar 30%. Dari kedua tahun tersebut, diperoleh selisih layanan sebesar 29% tahun 2010, dan 39% di tahun 2015. Perubahan selisih layanan yang terjadi menginterpretasikan bahwa terdapat perbaikan pelayanan saat setelah pemekaran dilakukan. Di lain sisi, selisih pelayanan ini mempengaruhi perubahan nilai Indeks Gini, karena pada faktanya besaran selisih menggambarkan tingkat pemerataan pelayanan di masing-masing kecamatan.

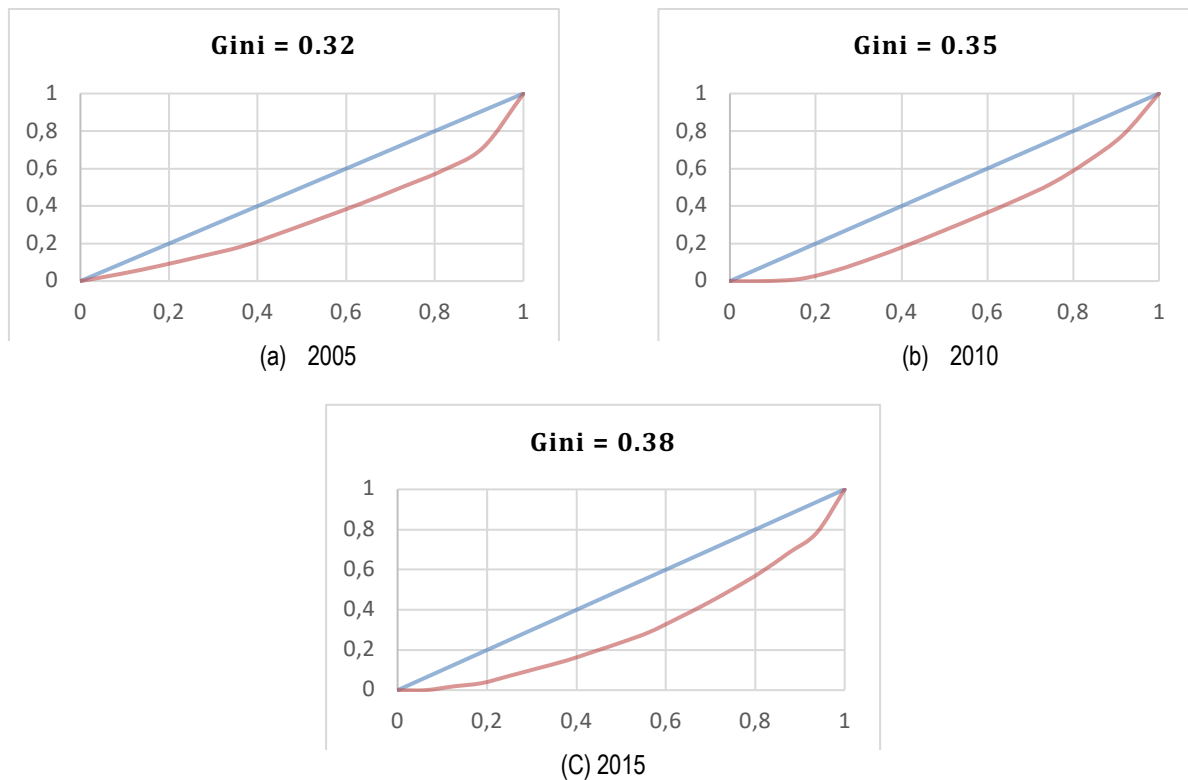
Perubahan nilai Indeks Gini untuk masing-masing tahun di Kabupaten Kerinci tentu saja dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terkait dengan perkembangan wilayah dan perubahan kecukupan layanan di masing-masing kecamatan untuk tahun tersebut. Perubahan yang terjadi dalam kurun waktu lima belas tahun menunjukkan bahwa pemerataan pelayanan pendidikan di Kabupaten Kerinci sudah baik. Perubahan nilai Indeks Gini ini dipengaruhi oleh perubahan tingkat kecukupan pelayanan di tahun tersebut. Seperti yang terjadi di tahun 2010 setelah pemekaran, wilayah dengan tingkat kecukupan tertinggi berada di Kecamatan Air Hangat sebesar 69%, dan terendah di Kecamatan Sitinjau Laut sebesar 40%, sedangkan pada tahun 2015 untuk pelayanan tertinggi berada di angka 69%, dan terendah sebesar 30%. Dari kedua tahun tersebut, diperoleh selisih layanan sebesar 29% tahun 2010, dan 39% di tahun 2015. Perubahan selisih layanan yang terjadi menginterpretasikan bahwa terdapat perbaikan pelayanan saat setelah pemekaran dilakukan. Di lain sisi selisih pelayanan ini mempengaruhi perubahan nilai Indeks Gini karena pada faktanya besaran selisih menggambarkan tingkat pemerataan pelayanan di masing-masing kecamatan.



Gambar 5. Distribusi Pelayanan Fasilitas Pendidikan SMP Kota Sungai Penuh Tahun 2010-2015

Pada Gambar 5 untuk penurunan pemerataan pelayanan yang terbesar dialami oleh Kota Sungai Penuh pasca dimekarkan dari Kabupaten Kerinci. Pada tahun 2010 tingkat pemerataan pelayanannya berada dalam kategori baik dengan nilai Indeks Gini sebesar 0.20. Pada tahun tersebut untuk tingkat pelayanan tertinggi berada di angka 119% di Kecamatan Sungai Penuh, dan terendah di angka 47% di Kecamatan Kumun Debai. Dari kedua wilayah tersebut diperoleh selisih layanan sebesar 72%, sedangkan untuk tahun 2015 memiliki selisih layanan sebesar 311%. Hal ini karena terdapat pemusatan pelayanan di satu kecamatan yakni Kecamatan Sungai Penuh, sehingga memperbesar angka kesenjangan pemerataan pelayanan agregat.

4.2.3 Tingkat Pemerataan Penyediaan Fasilitas Pendidikan Sekolah Menengah Atas



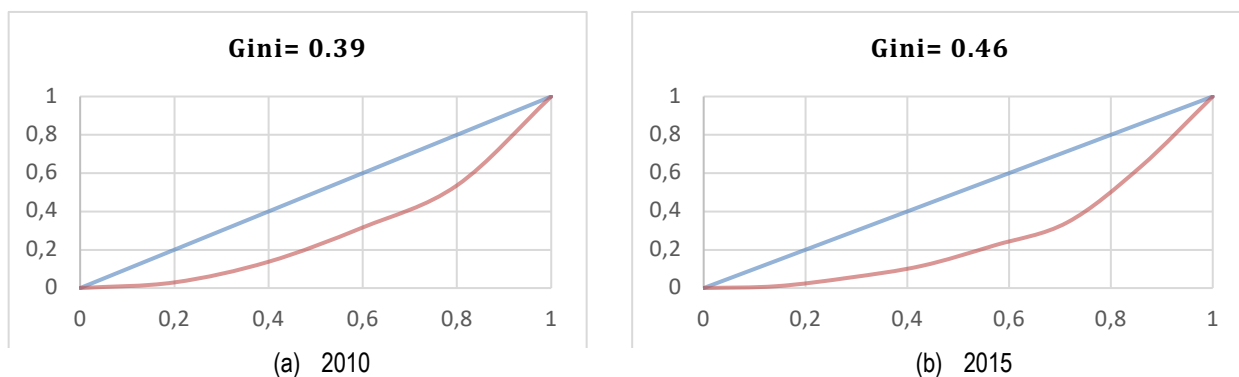
Gambar 6. Distribusi Pelayanan Fasilitas Pendidikan SMA Kabupaten Kerinci Tahun 2005-2015

Pemerataan pelayanan fasilitas pendidikan SMA memiliki kesenjangan yang cukup besar jika dibandingkan dengan pemerataan pelayanan SD dan SMP. Berdasarkan angka Indeks Gini pada tahun 2005-2015 (lihat Gambar 6) menunjukkan bahwa pemerataan pelayanan Kabupaten Kerinci berada dalam kategori pemerataan sedang dengan nilai Indeks Gini yang

semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2005 dengan enam belas kecamatan nilai Indeks Gini untuk pemerataan pelayanan pendidikan berada di angka 0.32. Dari angka ini jika dilihat dari sisi tingkat kecukupan pelayanan menunjukkan bahwa Kabupaten Kerinci memiliki selisih layanan sebesar 112%, dengan pelayanan tertinggi sebesar 129% dan terendah sebesar 17%. Sedangkan untuk rata-rata pelayanan di masing-masing kecamatan berkisar di angka 10-100%. Perbedaan yang paling mendasar dalam hal pemerataan pelayanan di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh terlihat bahwa untuk jenjang pendidikan SMA memiliki pelayanan yang relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan SD dan SMP.

Dalam hal pemerataan untuk jenjang pendidikan SMA berada dalam kategori pemerataan sedang, dengan pelayanan tertinggi dari tahun 2005-2015 sebesar 131% di Kecamatan Air Hangat Barat, sedangkan yang terendah berada di angka 10% di Kecamatan Depati VII. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa dalam penyediaan pelayanan pendidikan SMA belum terlalu baik untuk masing-masing kecamatan. Selain dari rendahnya tingkat kecukupan, terdapat kecamatan yang belum terlayani oleh sarana pendidikan SMA seperti Kecamatan Air Hangat. Hal ini terjadi akibat adanya pemekaran kecamatan baru, sehingga menggantikan kewenangan administratif sekolah di kecamatan lama (induk) ke kecamatan baru. Dengan adanya hal tersebut dapat dikatakan bahwa dalam saat pemekaran wilayah dilakukan, belum mempertimbangkan aspek layanan pendidikan.

Untuk Kota Sungai Penuh (lihat Gambar 7) meskipun secara kecukupan sudah lebih baik dari Kabupaten Kerinci, namun karena adanya pemusatan pelayanan di Kecamatan Sungai Penuh pada tahun 2015 mencapai 300% mengakibatkan besarnya kesenjangan yang terjadi pada tahun tersebut. Hal inilah yang menjadi faktor menurunnya tingkat pemerataan pelayanan di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh secara keseluruhan.



Gambar 7. Distribusi Pelayanan Fasilitas Pendidikan SMA Kota Sungai Penuh Tahun 2010-2015

5. KESIMPULAN

Penelitian ini memperlihatkan bahwa proses pemekaran daerah, terutama pemekaran daerah yang melakukan pemekaran kawasan pusat pelayanan dari suatu kabupaten induk untuk menjadi suatu daerah baru, seperti kasus pemekaran Kabupaten Kerinci yang memekarkan wilayah Kecamatan Sungai Penuh yang merupakan ibu kota dan sekaligus kawasan pusat pelayanan Kabupaten Kerinci di masa lalu menjadi daerah baru yaitu Kota sungai Penuh, memiliki potensi untuk mengubah tingkat pelayanan fasilitas apabila proses pemekaran tersebut tidak diiringi dengan upaya pembangunan fasilitas-fasilitas pelayanan yang tersedia pada kawasan pusat pelayanan yang dimekarkan tersebut. Disadari bahwa pembangunan fasilitas-fasilitas tersebut bukan merupakan suatu proses pembangunan yang mudah, karena membutuhkan dukungan dana pembangunan dan juga waktu yang tidak sedikit. Namun ketiadaan proses pembangunan fasilitas-fasilitas yang mengiringi proses pemekaran daerah tersebut akan berdampak pada menurunnya tingkat pelayanan fasilitas pada kabupaten induk, setidaknya dari sudut pandang ketersediaan atau penyediaan fasilitas-fasilitas pelayanannya.

Sebaliknya, apabila proses pemekaran daerah tersebut dilakukan juga dengan diiringi oleh kebijakan pembangunan fasilitas-fasilitas pelayanan yang ditujukan untuk “mengganti” ketersediaan fasilitas-fasilitas pelayanan yang sebelumnya tersedia di kawasan pusat pelayanan, tetapi kemudian berubah menjadi fasilitas-fasilitas pelayanan milik daerah lain akibat dari pemekaran yang dilakukan, maka proses pemekaran yang dilakukan akan turut dapat dilakukan untuk meningkatkan

tingkat pelayanan fasilitas yang terdapat di suatu daerah yang menjadi kabupaten induk dalam suatu proses pemekaran. Apalagi apabila proses pembangunan fasilitas-fasilitas yang dilakukan untuk mengembalikan tingkat pelayanan tersebut dilakukan dalam suatu strategi distribusi pembangunan yang tepat, maka proses pemekaran daerah yang diiringi dengan proses pembangunan kembali tersebut, dapat diarahkan untuk meningkatkan kondisi dan tingkat pelayanan fasilitas kepada kondisi yang lebih baik.

Penelitian ini memperlihatkan adanya penurunan tingkat pelayanan fasilitas pendidikan SD yang dimiliki oleh Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai penuh, terutama pada tingkat kecukupannya pasca pemekaran yang dilakukan pada tahun 2008. Penurunan tersebut tidak hanya terjadi pada masa seketika pasca pemekaran (yang diperlihatkan dari kondisi tingkat kecukupannya di tahun 2010), tetapi juga pada jangka pendek pasca pemekaran (yang diperlihatkan oleh kondisi tingkat ketersediaannya di tahun 2015). Dalam konteks Kabupaten Kerinci, penurunan kondisi tingkat pelayanan tersebut terjadi karena berkurangnya sediaan fasilitas sekolah dasar yang dimiliki oleh Kabupaten Kerinci, akibat dari pemekaran daerah, yang tidak segera diiringi oleh pembangunan fasilitas-fasilitas sekolah dasar yang lain sebagai "pengganti" fasilitas-fasilitas yang "hilang" karena telah menjadi fasilitas yang dimiliki oleh daerah lain, yaitu Kota Sungai Penuh. Berkurangnya fasilitas pendidikan SD di Kabupaten Kerinci pasca pemekaran tersebut juga telah menurunkan tingkat kesetaraan sediaan pelayanan fasilitas SD di kabupaten ini, yang ditunjukkan dengan meningkatnya angka koefisien Gini ketersediaan fasilitas SD Kabupaten Kerinci dari 0,08 di tahun 2005 menjadi 0,16 di tahun 2015. Sedangkan pada Kota Sungai Penuh, penurunan kondisi ketersediaan tersebut diakibatkan oleh adanya pemekaran wilayah, dalam arti pembentukan kecamatan-kecamatan baru di Kota Sungai Penuh pasca pemekaran daerah atau pembentukan Kota Sungai Penuh tersebut.

Kondisi yang berbeda ditampilkan pada pelayanan fasilitas pendidikan SMP dan SMA, yang sejak awal memiliki tingkat pelayanan yang sangat berbeda dengan tingkat pelayanan fasilitas SD. Perbedaan tingkat pelayanan ini ditunjukkan dengan tingkat kecukupan yang hanya 38% dan 29% untuk fasilitas SMP dan SMA di tahun 2005, yang berada jauh dibawah tingkat kecukupan fasilitas SD yang mencapai 97% di tahun yang sama. Tingkat kecukupan fasilitas SMP dan SMA mengalami kenaikan pada tahun 2010 pada kedua daerah yaitu Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, walau kemudian keduanya mengalami penurunan lagi di tahun 2015 di kedua daerah tersebut. Penurunan tingkat pelayanan juga tampak dari sisi pemerataan ketersediaan fasilitas antar-kecamatan, yang ditunjukkan oleh meningkatnya angka koefisien Gini pada ketersediaan fasilitas SMP dan SMA di kedua daerah, yaitu Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh pasca pemekaran. Kondisi ini juga memperlihatkan bahwa pembangunan fasilitas SMP dan SMA yang dilakukan belum mampu meningkatkan tingkat pelayanannya kepada kondisi yang ideal, yang berada pada angka kecukupan yang berkisar pada angka 90an persen dengan nilai angka atau Indeks Gini yang berada dekat kepada angka 0,0.

Berbasis pada hasil analisis yang dilakukan, maka penelitian ini merekomendasikan agar proses pemekaran daerah juga dilakukan dengan melakukan audit atau penilaian tingkat pelayanan fasilitas yang terdapat pada daerah dan wilayah akan dilakukan pemekaran, terutama apabila pemekaran yang dilakukan akan memisahkan wilayah kawasan atau lokasi pusat pelayanan fasilitas seperti fasilitas pendidikan, kesehatan dan fasilitas pelayanan sosial lainnya menjadi bagian wilayah dari daerah lainnya yang dihasilkan oleh proses pemekaran tersebut. Pelaksanaan audit dan penilaian tingkat pelayanan fasilitas ini dapat memberi perhatian kepada pengembangan strategi pemenuhan kebutuhan pelayanan fasilitas sosial dari masyarakat pada kabupaten induk maupun di daerah hasil pemekarannya, agar kegiatan pemekaran yang dilakukan juga dapat diarahkan untuk peningkatan pemenuhan kebutuhan pelayanan fasilitas yang ada dalam masyarakat, baik yang terdapat di kabupaten induk maupun di daerah baru hasil pemekarannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto, Syamsurizaldi, S., & Zetra, A. (2018). Manajemen Program Pengembangan Destinasi Pariwisata oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerinci. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 3(3), 226–238. <https://doi.org/10.25077/jakp.3.3.226-238.2018>

- Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia. (2004). *SNI 03-1733-2004 Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan*. Diakses dari: <http://nawasis.org/portal/digilib/read/sni-03-1733-2004-tata-cara-perencanaan-lingkungan-perumahan-di-perkotaan/51450>
- Christaller. (1933). *The Central Place of Southern Germany*. Terjemahan. Baskin C.W., dalam *A Critique and Translation of Walter Christaller's Die Zentralen Orte In Suddeutschland*.
- Citraningtias, C., & Kustiwan, I. (2009). Studi Perbandingan Karakteristik Pemanfaatan Fasilitas Penghuni Perumahan di Kawasan Coklat dan Kawasan Hijau di Kota Bandung. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 20(2), 109–126. Diakses dari: <https://journals.itb.ac.id/index.php/jpwk/article/view/4172/2252>
- Dadashpoor, H., Rostami, F., & Alizadeh, B. (2016). Is Inequality in The Distribution of Urban Facilities Inequitable? Exploring A Method for Identifying Spatial Inequity in an Iranian City. *Cities*, 52, 159–172. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2015.12.007>
- Faguet, J. P. (2004). Does Decentralization Increase Government Responsiveness to Local Needs? Evidence from Bolivia. *Journal of Public Economics*, 88(3–4), 867–893. [https://doi.org/10.1016/S0047-2727\(02\)00185-8](https://doi.org/10.1016/S0047-2727(02)00185-8)
- Kurniati, A. C., Suharso, T. W., & Surjono. (2010). Kajian Disparitas Sebagai Solusi Dalam Penentuan Pemilihan Kecamatan Baru di Kota Pasuruan. *Jurnal Tata Kota Dan Daerah*, 2(2).
- Nyarkoh, E. (2016). *The Degree of Autonomy in Colleges of Education in Ghana: A Comparative Study of Before and After their Upgrade to Tertiary Status*. Diakses dari: <https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/54536/Final-Thesis-for-Submission-.pdf?sequence=1>
- Pemerintah Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945*. Diakses dari: <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh Di Provinsi Jambi*. Diakses dari: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39660>
- Prakoso, F. B. (2018). *Analisis Tingkat Perkembangan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2005 - 2015*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ratnasari, Y., & Santoso, E. B. (2014). Penentuan Tipologi Kesenjangan Wilayah di. *Jurnal Teknik Pomits*, 3(2), 125–130. <https://doi.org/10.12962/j23373539.v3i2.7238>
- Rocco, R. (2014). Why Discuss Spatial Justice in Urbanism Studies? *Spatial Justice*. Diakses dari: http://cdiwsnc.org/wp-content/uploads/2019/09/why-discuss-spatial-justice-in-urbanism-studies_roberto-rocco.pdf
- Rondinelli, D. A. (1983). Implementing Decentralization Programmes in Asia: A Comparative Analysis. *Public Administration and Development*, 3(3), 181–207. <https://doi.org/10.1002/pad.4230030302>
- Rusmansyah. (2006). *Arahan Pengembangan Kawasan Barat Kabupaten Bangka* (Universitas Diponegoro). Universitas Diponegoro. Diakses dari: <http://eprints.undip.ac.id/15861/>
- Setiawan, R., & Syahbana, J. A. (2017). Kesetaraan Tingkat Pelayanan Fasilitas Sosial Dalam Perspektif Keadilan Ruang. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 13(4), 487–502. <https://doi.org/10.14710/pwk.v13i4.18267>
- Sofyan, I. L., Pradhanawati, A., & Nugraha, H. S. (2013). Pengaruh fasilitas dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas , melalui kepuasan konsumen sebagai variabel intervening pada Star Clean Car Wash Semarang. *Diponegoro Journal of Social and Politic*, 1–12. Diakses dari: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jiab/article/view/2505>
- Soja, E. W. (2016). *The City and Spatial Justice*. In *Justice et Injustice Spatiales* (pp. 56–72). Presses universitaires de Paris Nanterre.
- Sukmawati, A. M., & Yuliasuti, N. (2014). Efektivitas Pemanfaatan Fasilitas Sosial di Perumahan Bukit Kencana Jaya Semarang. *Jurnal Teknik PWK*, 3(3), 371–381. Diakses dari: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/pwk/article/view/5611>
- Suyarto, J. (1977). *Pendekatan Pembangunan Perkotaan Ditinjau dari Segi Perencanaan Lokal*. Yogyakarta: Balai Pembinaan Administrasi Universitas Gadjah Mada.
- Utari, M. G. E. S. (2015). Analisis Sistem Pusat Pelayanan Permukiman di Kota Yogyakarta Tahun 2014. *Jejak: Journal of Economics and Policy*, 8(1), 62–72. <https://doi.org/10.15294/jejak.v8i1.3856>
- Utoro, R. I. (2006). *Kajian Optimalisasi Pola dan Tingkat Pelayanan Sarana Dasar di Kota Kecamatan Jalancagak - Subang*. Universitas Diponegoro.
- Vo, D., Nguyen, T., Tran, N., & Vo, A. (2019). What Factors Affect Income Inequality and Economic Growth in Middle-Income Countries? *Journal of Risk and Financial Management*, 12(1), 40. <https://doi.org/10.3390/jrfm12010040>
- Widiansyah, A. (2017). Peran Ekonomi dalam Pendidikan dan Pendidikan dalam Pembangunan Ekonomi. *Cakrawala*, 17(2), 207–215. Diakses dari: <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala/article/view/2612/1797>
- Williams, J. (2013). *Toward a Theory of Spatial Justice*. Diakses dari: http://www.wpsanet.org/papers/docs/Williams_Spatial_Justice_WPSA_2013.pdf
- Wilsonyudho, S. (2009). Kesenjangan dalam Pembangunan Kewilayahan. *Forum Geografi*, 23(2), 167–180. <https://doi.org/10.23917/forgeo.v23i2.5009>
- Winardi. (2017). Decentralization of Education in Indonesia—A Study on Education Development Gaps in the Provincial Areas. *International Education Studies*, 10(7), 79–93. <https://doi.org/10.5539/ies.v10n7p79>